



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Selasa, 01 Juli 2025

Ketua: H. Abdillah Nashih Wakil Ketua: Suyarno, S.H., M.H. Wakil Ketua: H. Kayan, SH Wakil Ketua: Warth Anono, SE

RINGKASAN BERITA HARI INI



BUTUH DIPERBAIKI: SDN Tebel, Kecamatan Gedangan menjadi salah satu dari empat sekolah yang akan direhab tahun ini.

Empat SDN Masuk Daftar Lelang Rehab Siapkan Anggaran Rp 5 M

SEBANYAK empat Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten Sidoarjo akan direhabilitasi tahun ini. Saat ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Sidoarjo tengah menjalani proses lelang untuk menentukan kontraktor pelaksana proyek rehabilitasi tersebut. Empat sekolah tersebut yakni SDN Suko Sukodono, SDN Kletek Taman, SDN Klatingsari 2 Tarik, dan SDN Tebel Gedangan. Seluruhnya mengalami kerusakan berat, terutama pada sejumlah ruang kelas yang dinilai tidak layak untuk kegiatan belajar mengajar. Kepala Dispendikbud Sidoarjo, Tirta Adi, menyatakan bahwa proyek rehabilitasi keempat sekolah itu sudah masuk dalam rencana kegiatan tahun anggaran 2025. Namun, pelaksanaannya masih menunggu hasil lelang. "Proyek rehab empat sekolah tersebut masih dalam proses lelang. Hingga kini belum ada pemenang, dan prosesnya masih terus berjalan," ujar Tirta, Senin (30/6).



PENCEGAHAN: Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana peringatan Hari Anti Narkotika Internasional.

Wabup Serukan Sinergi Lintas Sektor Wujudkan Bebas Narkotika

KOTA-Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sidoarjo menegaskan kembali komitmennya dalam memerangi narkoba, pada puncak peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2025. Mengusung tema "Memutus Rantai Peredaran Gelap Narkoba Melalui Pencegahan, Rehabilitasi, dan Pemberantasan Menuju Indonesia Emas 2045", kegiatan ini juga dihadiri Kepala BNN Kabupaten Sidoarjo Kombes Pol Gatot Soengeng Soesanto, Sekretaris Daerah Sidoarjo, Kapolresta Kapolresta Sidoarjo, serta jajaran Forkopimda. Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana menyampaikan keprihatinannya atas masih tingginya angka penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan generasi muda.

"Kami, pimpinan daerah Kabupaten Sidoarjo, menyampaikan rasa keprihatinan karena masih banyak generasi muda yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan kehilangan masa depannya," ujar Mimik. Ia menegaskan bahwa pemberantasan narkoba bukan hanya tugas BNN atau aparat penegak hukum, melainkan menjadi tanggung jawab bersama semua elemen masyarakat. "Saya mengajak seluruh komponen masyarakat, baik dari instansi pemerintah, swasta, dunia pendidikan, hingga seluruh lapisan masyarakat, untuk bersama-sama mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba. Tujuannya satu: mewujudkan Kabupaten Sidoarjo Bersinar, yakni Bersih dari Narkoba," tegasnya. Sementara itu, Kepala BNN Kabupaten Sidoarjo Kombes Pol Gatot Soengeng Soesanto mengapresiasi dukungan penuh dari Pemkab Sidoarjo dalam berbagai program pencegahan dan pemberantasan narkoba. "Terima kasih atas sinergi luar biasa dengan Pemkab Sidoarjo. Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat dalam upaya mewujudkan Sidoarjo Bersih dari Narkoba dan mendukung visi Indonesia Emas 2045," ungkapnya. Peringatan HANI 2025 diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman narkoba melalui sinergi strategis lintas sektor. Pemerintah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, dan masyarakat diharapkan terus bergerak bersama menjaga generasi muda dari bahaya narkoba. (sai/vga)



UNGGULAN: Salah satu UMKM olahan yang mengikuti Festival UMKM Radar Sidoarjo.

300 UMKM Masih Aktif Ekspor, Didominasi Produk Olahan

SEKITAR 300 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sidoarjo tercatat masih aktif menembus pasar ekspor. Produk makanan dan minuman menjadi sektor yang paling mendominasi di antara jenis produk lainnya. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sidoarjo, Listyaningsih. Ia menyebut, pihaknya secara rutin melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM yang berpotensi ekspor, terutama pasca kenaikan tarif ekspor ke Amerika Serikat. "Sekarang kami lebih fokus mencari pasar alternatif selain Amerika Serikat. Pendampingan kami lakukan mulai dari tahap kurasi produk hingga pelatihan intensif," ujarnya kepada Radar Sidoarjo, Senin (30/6). Namun, tidak semua UMKM bisa langsung ikut program tersebut. Hanya pelaku usaha yang telah melengkapi legalitas seperti izin BPOM, sertifikat halal, dan merek dagang yang dapat diikutsertakan dalam program ekspor.

Kades Laporkan Adanya RPH Ilegal di Krian yang Masih Bebas Beroperasi

KRIAN-Praktik penyembelihan hewan secara ilegal atau Rumah Potong Hewan (RPH) ilegal di wilayah Kecamatan Krian hingga kini masih bebas beroperasi. Kepala Desa Tropodo, Haris Iswandi, menyampaikan bahwa aduan terkait aktivitas tersebut belum mendapatkan tindak lanjut dari pihak berwenang. "Belum ada info," ujar Haris singkat saat dikonfirmasi Radar Sidoarjo, Senin (30/6). Aduan tersebut sebelumnya telah disampaikan langsung kepada Kementerian Lingkungan Hidup, bertepatan dengan audiensi pembahasan pencemaran asap dari limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) beberapa waktu lalu. Dalam forum tersebut, Haris juga menyinggung permasalahan lain yang tak kalah serius, yakni pencemaran sungai akibat



MENGKHAWATIRKAN: Salah satu sungai di Desa Tropodo diduga tercemari limbah pemotongan hewan.

limbah penyembelihan liar. Menurut Haris, limbah dari aktivitas RPH ilegal dibuang langsung ke sungai yang melintasi kawasan permukiman warga, sehingga menimbulkan keresahan dan berpotensi membahayakan lingkungan. "Saya dihubungi warga soal keluhan ini. Selain asap dari limbah B3, di lingkungan kami juga ada aktivitas penyembelihan liar yang mencemari sungai," jelasnya. Ia berharap masalah ini mendapat perhatian serius dari instansi terkait, demi menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan warga sekitar. "Harapan kami, harapan warga, lingkungan bisa terbebas dari dua sumber pencemaran utama: asap limbah B3 dan limbah dari penyembelihan liar," pungkasnya. (sai/vga)

300 UMKM...

"Kalau belum punya legalitas, kami arahkan untuk melengkapi dulu. Setelah itu baru bisa kami dampingi," tegasnya. Program pendampingan ekspor digelar setiap tahun dan pada 2025 mendatang akan dimulai bulan Juli selama tiga bulan. Seleksi peserta dilakukan berdasarkan kesiapan produk dan komitmen dalam mengikuti pelatihan. "Kalau cuma datang dua hari lalu tidak hadir lagi, ya kami anggap tidak

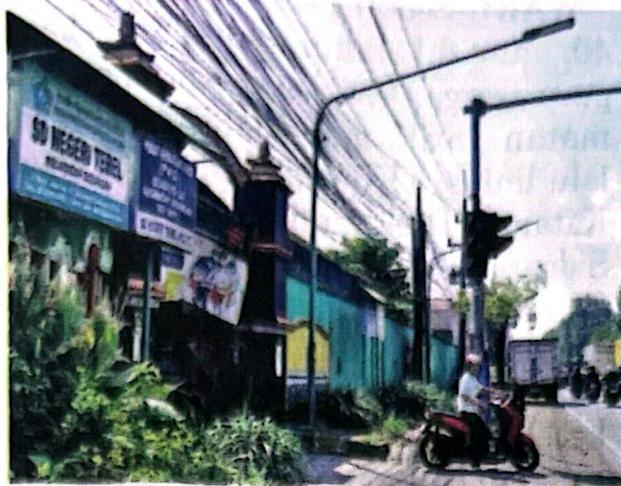
serius. Yang betul-betul niat pasti aktif dan terus berkoordinasi," tambahnya. Listyaningsih menjelaskan bahwa produk olahan, khususnya makanan, minuman, dan hasil olahan ikan, masih menjadi unggulan ekspor UMKM Sidoarjo. Meski begitu, sektor fesyen seperti sepatu dan pakaian juga mulai menunjukkan potensi, meski jumlahnya belum signifikan. Ia mengakui, masih banyak UMKM yang belum terpantau aktivitas ekspornya karena tidak melapor ke dinas. Ada juga yang melakukan ekspor melalui pihak ketiga atau plat-

Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan Sekretariat DPRD Sidoarjo



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



M SAIFUL ROHMAN/RADAR SIDOARJO

BUTUH DIPERBAIKI: SDN Tebel, Kecamatan Gedangan menjadi salah satu dari empat sekolah yang akan direhab tahun ini.

Empat SDN Masuk Daftar Lelang Rehab Siapkan Anggaran Rp 5 M

SEBANYAK empat Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten Sidoarjo akan direhabilitasi tahun ini. Saat ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Sidoarjo tengah menjalani proses lelang untuk menentukan kontraktor pelaksana proyek rehabilitasi tersebut.

Empat sekolah tersebut yakni SDN Suko Sukodono, SDN Kletek Taman, SDN Klantingsari 2 Tarik, dan SDN Tebel Gedangan. Seluruhnya mengalami kerusakan berat, terutama pada sejumlah ruang kelas yang dinilai tidak layak untuk kegiatan belajar mengajar.

Kepala Dispendikbud Sidoarjo, Tirto Adi, menyatakan bahwa proyek rehabilitasi keempat sekolah itu sudah masuk dalam rencana kegiatan tahun anggaran 2025. Namun, pelaksanaannya masih menunggu hasil lelang.

“Proyek rehab empat sekolah tersebut masih dalam proses lelang. Hingga kini belum ada pemenang, dan prosesnya masih terus berjalan,” ujar Tirto, Senin (30/6).



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



IST
UNGGULAN: Salah satu UMKM olahan yang mengikuti Festival UMKM Radar Sidoarjo.

300 UMKM Masih Aktif Ekspor, Didominasi Produk Olahan

SEKITAR 300 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sidoarjo tercatat masih aktif menembus pasar ekspor. Produk makanan dan minuman menjadi sektor yang paling mendominasi di antara jenis produk lainnya.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sidoarjo, Listyaningsih. Ia menyebut, pihaknya secara rutin melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM yang berpotensi ekspor, terutama pasca kenaikan tarif ekspor ke Amerika Serikat.

“Sekarang kami lebih fokus mencari pasar alternatif selain Amerika Serikat. Pendampingan kami lakukan mulai dari tahap kurasi produk hingga pelatihan intensif,” ujarnya kepada Radar Sidoarjo, Senin (30/6).

Namun, tidak semua UMKM bisa langsung ikut program tersebut. Hanya pelaku usaha yang telah melengkapi legalitas seperti izin BPOM, sertifikat halal, dan merek dagang yang dapat diikutsertakan dalam program ekspor.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Kades Laporkan Adanya RPH Ilegal di Krian yang Masih Bebas Beroperasi

KRIAN-Praktik penyembelihan hewan secara ilegal atau Rumah Potong Hewan (RPH) ilegal di wilayah Kecamatan Krian hingga kini masih bebas beroperasi. Kepala Desa Tropodo, Haris Iswandi, menyampaikan bahwa aduan terkait aktivitas tersebut belum mendapatkan tindak lanjut dari pihak berwenang. "Belum ada info," ujar Haris singkat saat dikonfirmasi Radar Sidoarjo, Senin (30/6).

Aduan tersebut sebelumnya telah disampaikan langsung kepada Kementerian Lingkungan Hidup, bertepatan dengan audiensi pembahasan pencemaran asap dari limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) beberapa waktu lalu. Dalam forum tersebut, Haris juga menyinggung permasalahan lain yang tak kalah serius, yakni pencemaran sungai akibat



MENGKHAWATIRKAN: Salah satu sungai di Desa Tropodo diduga tercemari limbah pemotongan hewan.

limbah penyembelihan liar.

Menurut Haris, limbah dari aktivitas RPH ilegal dibuang langsung ke sungai yang melintasi kawasan permukiman warga, sehingga menimbulkan keresahan dan berpotensi membahayakan lingkungan.

"Saya dihubungi warga soal keluhan ini. Selain asap dari limbah B3, di lingkungan kami juga ada aktivitas penyembelihan liar yang mencemari sungai," jelasnya.

Ia berharap masalah ini mendapat perhatian serius dari instansi terkait, demi menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan warga sekitar.

"Harapan kami, harapan warga, lingkungan bisa terbebas dari dua sumber pencemaran utama: asap limbah B3 dan limbah dari penyembelihan liar," pungkasnya. (sai/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

300 UMKM...

"Kalau belum punya legalitas, kami arahkan untuk melengkapinya dulu. Setelah itu baru bisa kami dampingi," tegasnya.

Program pendampingan ekspor digelar setiap tahun dan pada 2025 mendatang akan dimulai bulan Juli selama tiga bulan. Seleksi peserta dilakukan berdasarkan kesiapan produk dan komitmen dalam mengikuti pelatihan.

"Kalau cuma datang dua hari lalu tidak hadir lagi, ya kami anggap tidak

serius. Yang betul-betul niat pasti aktif dan terus berkoordinasi," tambahnya.

Listyaningsih menjelaskan bahwa produk olahan, khususnya makanan, minuman, dan hasil olahan ikan, masih menjadi unggulan ekspor UMKM Sidoarjo. Meski begitu, sektor fesyen seperti sepatu dan pakaian juga mulai menunjukkan potensi, meski jumlahnya belum signifikan.

Ia mengakui, masih banyak UMKM yang belum terpantau aktivitas ekspornya karena tidak melapor ke dinas. Ada juga yang melakukan ekspor melalui pihak ketiga atau plat-

form marketplace online, sehingga sulit untuk didata secara langsung.

"Banyak yang ekspor tapi bukan atas nama sendiri, seperti di Tanggulangin. Mereka ekspor lewat online, jadi datanya tidak masuk ke

kami," jelasnya.

Tantangan lainnya adalah penyesuaian kualitas produk dengan standar pasar luar negeri. Menurutnya, kendala seperti rasa, kemasan, dan spesifikasi teknis kerap menjadi

alasan buyer menolak sampel.

"Biasanya buyer akan minta perbaikan kalau ada kekurangan. Di sinilah pelaku usaha dituntut untuk terus berbenah dan adaptif," pungkasnya. (sai/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Empat SDN Masuk...

Ia menambahkan, perbaikan dilakukan karena kondisi bangunan sekolah sudah tidak memenuhi standar kelayakan untuk digunakan sebagai ruang belajar. Oleh karena itu, perbaikan perlu segera dilakukan demi kenyamanan dan keamanan siswa serta guru.

Berdasarkan data dari LPSE Kabupaten Sidoarjo, total anggaran yang disiapkan untuk empat proyek tersebut lebih dari Rp 5 miliar, sesuai dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) masing-masing paket.

Tahun ini, total ada 79 SDN yang masuk program rehabilitasi. Tiga di antaranya akan mendapat tambahan

Ruang Kelas Baru (RKB). Untuk seluruh kegiatan rehab dan pembangunan RKB, anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp 54 miliar.

“Percepatan rehabilitasi sekolah menjadi prioritas kami untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan mendukung kegiatan belajar yang optimal,” tegas Tirto. (sai/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



PENCEGAHAN: Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana peringati Hari Anti Narkotika Internasional.

Wabup Serukan Sinergi Lintas Sektor Wujudkan Bebas Narkoba

KOTA-Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sidoarjo menegaskan kembali komitmennya dalam memerangi narkoba pada puncak peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2025.

Mengusung tema "Memutus Rantai Peredaran Gelap Narkoba Melalui Pencegahan, Rehabilitasi, dan Pemberantasan Menuju Indonesia Emas 2045", kegiatan ini juga dihadiri Kepala BNN Kabupaten Sidoarjo Kombes Pol Gatot Soegeng Soesanto, Sekretaris Daerah Sidoarjo, Kapolresta Kapolresta Sidoarjo, serta jajaran Forkopimda.

Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana menyampaikan keprihatinannya atas masih tingginya angka penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan generasi muda.

"Kami, pimpinan daerah Kabupaten Sidoarjo, menyampaikan rasa keprihatinan karena masih banyak generasi muda yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan kehilangan masa depannya," ujar Mimik.

Ia menegaskan bahwa pemberantasan narkoba bukan hanya tugas BNN atau aparat penegak hukum, melainkan menjadi tanggung jawab bersama semua elemen masyarakat.

"Saya mengajak seluruh komponen masyarakat, baik dari instansi pemerintah, swasta, dunia pendidikan, hingga seluruh lapisan masyarakat, untuk bersama-sama mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Tujuannya satu: mewujudkan Kabupaten Sidoarjo Bersinar, yakni Bersih dari Narkoba," tegasnya.

Sementara itu, Kepala BNN Kabu-

paten Sidoarjo Kombes Pol Gatot Soegeng Soesanto mengapresiasi dukungan penuh dari Pemkab Sidoarjo dalam berbagai program pencegahan dan pemberantasan narkoba.

"Terima kasih atas sinergi luar biasa dengan Pemkab Sidoarjo. Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat dalam upaya mewujudkan Sidoarjo Bersih dari Narkoba dan mendukung visi Indonesia Emas 2045," ungkapnya.

Peringatan HANI 2025 diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman narkoba melalui sinergi strategis lintas sektor. Pemerintah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, dan masyarakat diharapkan terus bergerak bersama menjaga generasi muda dari bahaya narkotika. (sai/vga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

LEGISLATIF POLITIK

Efek Putusan MK, Masa Jabatan Dewan Bisa Hingga 2031

🕒 Read Time: 1 Minute, 18 Second

SIDOARJO (liputansidoarjo.com)-

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemilu nasional (DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden) dan pemilu daerah (DPRD provinsi/kabupaten/kota serta kepala daerah) harus digelar terpisah, dengan jeda minimal 2 tahun dan maksimal 2,5 tahun.



Pelantikan anggota DPRD Sidoarjo 2024-2029

Dengan demikian, skema pemilu serentak lima kotak yang selama ini berlaku tidak lagi digunakan pada Pemilu 2029.

MK menilai pemisahan ini, untuk mewujudkan pemilu yang lebih berkualitas serta memudahkan pemilih dalam menyalurkan hak suaranya sebagai bentuk kedaulatan rakyat.

Putusan MK ini merupakan hasil uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) atas UU Pemilu dan UU Pilkada.

Jika ini diterapkan pada Pilkada Sidoarjo, maka dua tahun selepas masa jabatan kepala daerah saat ini, bisa jadi akan diambilkan PJ untuk mengisi kekosongan pejabat.

Namun bagaimana dengan posisi anggota dewan ?

Divisi Parmas dan SDM KPU Kabupaten Sidoarjo Mokhammad Yasin menyatakan, KPU Sidoarjo sampai detik ini belum mendapatkan informasi apapun dari KPU pusat terkait keputusan MK itu.

Namun jika melihat putusannya, bisa jadi masa jabatan anggota DPRD Sidoarjo akan diperpanjang selama 2 tahun hingga 2.5 tahun.

"Kalau kepala daerah bisa di PJ diambilkan dari pejabat propinsi. Namun karena dewan tidak bisa di PJ, maka bisa jadi masa jabatannya akan diperpanjang hingga tahun 2031," tutur Yasin.

Sementara itu sesuai dengan keputusan MK itu,

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memerintahkan pemilu nasional dan daerah digelar terpisah.

Afifuddin menilai pemisahan ini lebih ideal dari sisi pengaturan waktu, desain keserentakan, serta tata kelola penyelenggaraan pemilu. (Abidin)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Buntut Putusan MA, Bupati Sidoarjo Janji Berhentikan Slamet Setiawan dari Jabatan Direktur Teknik Perumda Delta Tirta



Republikjatim.Com

Senin, 30 Jun 2025 17:00 WIB



Sidoarjo (republikjatim.com) - Bupati Sidoarjo, Subandi berjanji bakal segera memberhentikan Direktur Teknik dan Operasional (Dirtekops) Perumda Delta Tirta Sidoarjo, Slamet Setiawan. Ini menyusul, putusan Mahkamah Agung (MA) yang memutuskan pejabat kawakan Perumda Delta Tirta yang pernah menjabat Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Sidoarjo Periode 2012-2014 ini dijatuhi putusan bersalah oleh MA dengan hukuman enam tahun penjara.

Putusan MA itu, atas dikabulkannya permohonan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sidoarjo. Dalam putusan MA terbaru itu, majelis hakim MA menjatuhkan vonis 6 tahun penjara terhadap Slamet Setiawan.

Bupati Sidoarjo, Subandi saat dikonfirmasi berjanji bakal memberhentikan Slamet Setiawan dari jabatannya sebagai Direktur Teknik dan Operasional Perumda Delta Tirta Sidoarjo.

"Pasti beliaunya (Slamet Setiawan) segera diberhentikan," kata Subandi singkat melalui pesan WhatsApp (WA), Minggu (30/06/2025) kemarin.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Surabaya, Mahkamah Agung (MA) akhirnya mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) I Putu Kisnu Gupta SH dalam perkara tindak pidana korupsi anggaran Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) karyawan Perumda Delta Tirta dengan terdakwa Slamet Setiawan. Sebelumnya pengadilan negeri memvonis Slamet Setiawan dan kawan - kawan (dkk) bebas dalam amar putusan di pengadilan tingkat pertama.

Putusan kasasi bernomor 3014 K/Pid.Sus/2025 ini diputuskan pada Kamis tanggal 15 Mei 2025 kemarin oleh Majelis Hakim Agung yang diketuai Duwiarso Budi Santitarto, SH MHum. Dalam amar putusan itu menyatakan terdakwa Slamet Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Majelis hakim membatalkan putusan sebelumnya dan menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun serta denda Rp 300 juta, subsidi tiga bulan kurungan. Selain itu, majelis juga menjatuhkan pidana tambahan berupa Uang Pengembalian (UP) Rp 3,9 miliar subsidi tiga tahun penjara," begitu bunyi kutipan amar putusan yang ada di SIPP Pengadilan Negeri Surabaya.

Pengiriman berkas kasasi dilakukan Pengadilan Negeri Surabaya pada 3 September 2024. Hal ini menyusul rangkaian proses hukum yang telah dilalui, termasuk memori kasasi JPU pada 8 Agustus 2024 kemarin dan kontra memori terdakwa pada 22 Agustus 2024 lalu.

Diketahui sebelumnya, di pengadilan tingkat pertama, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Ferdinand Marcus Leander SH MH membebaskan para terdakwa korupsi di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Perumda Delta Tirta Sidoarjo.

Ketiga terdakwa itu diantaranya, Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Sidoarjo Periode 2012-2014 Slamet Setiawan SH MM, Bendahara KPRI Delta Tirta Sidoarjo Juriyah SE dan Samsul Hadi bagian Pasba (Sambungan Rumah) KPRI Delta Tirta Sidoarjo pada Kamis (25/06/2024) lalu.

Sementara secara terpisah Direktur Utama (Dirut) Perumda Delta Tirta Sidoarjo, Dwi Hary Soeryadi menegaskan terkait vonis MA kepada Direktur Teknik dan Operasional itu, pihaknya hanya bisa menunggu keputusan Bupati Sidoarjo.

"Untuk keputusan MA soal Pak Dirops itu, kami menunggu putusan Pak Bupati saja. Karena itu adalah mutlak kewenangan beliau (Bupati Sidoarjo) dan yang memutuskannya juga Bupati. Hal itu, sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Kami menyerahkan semua keputusan itu ke Bupati Sidoarjo. Karena semua masuk dalam kewenangan Bupati Sidoarjo," tandasnya. Hel/Waw





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Kunjungi Atlet Sepakbola Putri Cidera, Bupati Sidoarjo Jamin Biaya Medis Pengobatan Sekaligus Renovasi Rumah Naila Putri



Republikjatim.Com

Senin, 30 Jun 2025 08:34 WIB



Sidoarjo (republikjatim.com) - Bentuk kepedulian dan tanggung jawab penuh ditunjukkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terhadap para atlet olahraganya yang sudah dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX Jawa Timur 2025 di Malang Raya. Salah satu bentuk kepedulian ini ditunjukkan

Bupati Sidoarjo, H Subandi dengan turun langsung mengunjungi Naila Putri Nurmalasari, salah seorang atlet sepak bola putri andalan Sidoarjo yang mengalami cedera patah tulang pada kaki kanannya, Minggu (29/06/2025).

Tidak tanggung-tanggung Bupati Sidoarjo Subandi tidak hanya membantu biaya medis untuk perawatan atlet yang mengalami cedera itu. Akan tetapi, juga memutuskan untuk membantu merenovasi rumah Naila Putri Nurmalasari karena rumah itu dianggap masuk sebagai Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Hal ini lantaran kondisi rumahnya cukup memprihatinkan.



Naila Putri Nurmalasari, yang akrab disapa Nayia ini diketahui mengalami cedera kaki kanan saat berjuang membela tim Sepakbola Putri Kabupaten Sidoarjo dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX Jawa Timur 2025 di Malang Raya kemarin.

Kunjungan Bupati Sidoarjo, Subandi ke rumah Naila Putri Nurmalasari di Desa Pangreh, Kecamatan Jabon, Sidoarjo ini, tidak hanya untuk memberikan dukungan moril. Akan tetapi, orang nomor satu di Kabupaten Sidoarjo ini juga membawa solusi konkret atas musibah yang menimpa atlet muda berbakat itu.

Di hadapan Nayia dan keluarganya, Bupati Sidoarjo, H Subandi memastikan komitmen pemerintah daerah (Pekab Sidoarjo) untuk menanggung seluruh proses dan biaya medis untuk penyembuhan Naila Putri Nurmalasari hingga tuntas. Subandi yang juga mantan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo ini menyatakan atlet berprestasi seperti Naila Putri Nurmalasari merupakan aset berharga bagi Kabupaten Sidoarjo. Karena itu, kesehatan dan pendidikan Naila Putri Nurmalasari juga harus bisa dijaga dan dipenuhi Pekab Sidoarjo.

"Naila Putri Nurmalasari ini aset bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Perjuangannya untuk mengharumkan nama daerah Kabupaten Sidoarjo sangat kami hargai. Karena itu, sudah menjadi kewajiban kami (Pekab Sidoarjo) untuk memastikan Naila Putri Nurmalasari mendapatkan perawatan terbaik hingga sembuh total secara medis. Bahkan, bisa kembali mengejar cita-citanya menjadi atlet profesional," ujar Bupati Sidoarjo, H Subandi kepada republikjatim.com, Senin (30/06/2025).





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Untuk merealisasikan komitmen itu, lanjut Subandi pihak Pemkab Sidoarjo bakal berkoordinasi langsung dengan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kabupaten Sidoarjo. Terutama untuk memberikan jaminan bantuan senilai Rp 21 juta yang telah disiapkan sebagai penanganan awal.

"Kendati demikian, kami (Pemkab Sidoarjo) tetap dengan komitmen penuh Pemkab Sidoarjo akan menanggung seluruh biaya Naila Putri Nurmalasari kalau diperlukan. Bahkan, hingga Naila Putri Nurmalasari bisa dinyatakan pulih seratus persen oleh tim medis atau rumah sakit yang menanganinya," ungkap mantan Kepala Desa (Kades) Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo ini.

Kepedulian Bupati Sidoarjo, Subandi ini juga tidak berhenti pada jaminan kesehatan medis saja bagi Naila Putri Nurmalasari. Namun, karena saat berada di rumah Naila Putri Nurmalasari, perhatian Bupati Sidoarjo juga tertuju pada kondisi atap rumahnya yang sebagian besar sudah keropos dan rapuh. Kondisi itu, dinilai Bupati Sidoarjo Subandi bisa sangat membahayakan keselamatan Naila Putri Nurmalasari beserta keluarganya yang tinggal di rumah itu.

"Karena kami melihat kondisi rumah Naila Putri Nurmalasari yang juga tidak layak huni, maka kami akan segera berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan renovasi rumah pada baginya atapnya. Kami berharap usai direnovasi dengan menggunakan anggaran RTLH, Naila Putri Nurmalasari dan keluarganya dapat hidup di rumah itu dengan kondisi yang, aman, nyaman dan tenang serta tidak ketakutan atapnya ambrol atau jebol," tegasnya.

Bagi Bupati Sidoarjo, H Subandi langkah cepat sekaligus solutif yang ditunjukkan Bupati Sidoarjo ini menjadi angin segar bagi dunia olahraga Kabupaten Sidoarjo. Hal ini, menunjukkan pesan kuat jika Pemkab Sidoarjo tidak hanya menghargai prestasi para atlet saat di lapangan saja.

"Akan tetapi, kami (Pemkab Sidoarjo) juga memiliki kepedulian secara utuh terhadap kesejahteraan para atletnya. Terutama bagi sekitar 500 atlet yang saat ini bertanding dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX Jawa Timur 2025 di Malang Raya maupun dalam sejumlah event kegiatan olahraga lainnya," ungkapnya.

Ketua Baznas Kabupaten Sidoarjo, M Chasbil Aziz Saldju Sodar yang akrab disapa Gus Jazuk mengungkapkan sejak Januari hingga Mei 2025 sudah ada sebanyak 84 rumah direnovasi. Khusus bulan Juni, terdapat 25 RTLH yang diperbaiki. Program bedah rumah Baznas Sidoarjo memberikan bantuan maksimal Rp 20 juta per rumah. Namun, untuk kasus khusus yang membutuhkan renovasi total, anggaran bisa mencapai Rp 25 juta.

"Saat ini, daftar tunggu perbaikan RTLH di Kabupaten Sidoarjo mencapai lebih dari 200 rumah. Tim akan survei ke lokasi untuk memastikan kondisi dan legalitas rumah serta membuat Rencana Anggaran Perbaikan (RAP)," papar Gus Jazuk.

Sementara Sepakbola Putri Kabupaten Sidoarjo yang cedera, Naila Putri Nurmalasari tidak bisa menyembunyikan rasa syukurnya. Ia merasa tak sanggup memperbaiki rumahnya sendiri begitu juga kedua orangtuanya yang penghasilannya pas-pasan.



"Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Bupati dan semua yang sudah membantu saya. Semoga sakit saya ini bisa segera pulih dan rumah saya bisa segera diperbaiki," katanya terharu.

Sementara Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sidoarjo, Imam Mukri Effendi menegaskan perolehan medali sampai dengan tanggal 26 Juni 2025 atlet Kabupaten Sidoarjo mendapatkan 21 medali emas, 20 perak dan 28 perunggu dengan total poin 152 perolehan. Karena itu, pihaknya berharap atlet yang cedera seperti Naila Putri Nurmalasari bisa segera sembuh dan pulih secara medis seperti saat sebelum pertandingan sepakbola di ajang Porprov Jatim IX Tahun 2025 ini.

"Untuk itu, saya berharap hal ini dapat menjadi pelecut bagi atlet yang belum bertanding untuk mendulang medali sebanyak-banyaknya," pintanya.

Imam Mukri menyampaikan pemerintah akan siap memberikan reward (penghargaan) berupa bonus kepada para atlet yang telah memperoleh kemenangan atau meraih medali dalam setiap Cabang Olahraga (Cabor).

"Selamat berjuang, keluarkan semangatmu untuk menjadi yang terbaik, terhebat, berprestasi dan menjadi sang juara. Berikan kebanggaan kepada orang tua kalian, keluarga kalian dan jadikan event Porprov ini sebagai momen untuk meraih prestasi terbaik. Sekaligus mencatatkan saudara sebagai bagian dari sejarah Sidoarjo dalam bidang keolahragaan," paparnya sembari memakaikan jaket seragam kontingen dan menyerahkan secara simbolis jaminan BPJS saat pemberangkatan bus kontingen menuju ke Kota Malang.

Imam mengakui pada Porprov Jatim 2025 kali ini diterapkan sistem perhitungan poin untuk menentukan peringkat setiap kontingen. Karena itu, perolehan medali emas bukan menjadi acuan untuk menentukan klasemen. Namun seluruh perolehan medali akan dikonversi menjadi poin. Saat ini, kontingen Kabupaten Sidoarjo berada di peringkat kedua dengan perolehan 93 poin dibawah Kota Surabaya.

"Kami berharap kontingen Kabupaten Sidoarjo dapat mencapai poin yang ditargetkan. Pada Porprov Jatim tahun 2023 dulu poin yang didapat oleh atlet Sidoarjo sebanyak 680 point, untuk Porprov tahun 2025 ini ditargetkan lebih tinggi sebesar 750 sampai 800 poin, tapi kami berharap lebih tinggi dari itu," ucapnya.

Imam juga menilai pelepasan Kontingen Kabupaten Sidoarjo akan dibagi dua gelombang. Gelombang pertama dilakukan hari ini yang diikuti Cabor Hockey out door, Cabor Akuatik, Cabor Atletik dan Cabor Kriket. Sedangkan untuk pelepasan gelombang kedua akan dilakukan hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 di Pendopo Delta Wibawa. Pelepasan yang dilakukan langsung Bupati Sidoarjo kemarin itu, diharapkan menjadi pemicu semangat para atlet dalam bertanding.

"Pelepasan Porprov tahun ini kami bagi menjadi dua gelombang. Kalau hanya satu kali tempat ini tidak mencukupi. Terima kasih Bapak Bupati berkenan melepas atlet-atlet kami berlaga untuk menambah semangat mengikuti Porprov Tahun 2025 ini dan berjuang untuk prestasi Kabupaten Sidoarjo," pungkasnya. Adv/Ary/Waw





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Dinilai Tak Transparan Kelola TPS3R, Penarik Gerobak Sampah Kemiri Sidoarjo Demo Pertanyakan Hutang Rp 240 Juta



Republikjatim.Com

Selasa, 01 Jul 2025 09:29 WIB



Sidoarjo (republikjatim.com) - Puluhan petugas pengangkut (penarik gerobak) sampah Desa Kemiri/Kecamatan Kabupaten Sidoarjo menggelar aksi demo di kantor balai desa setempat, Senin (30/06/2025). Para pendemo menuntut para pengurus TPS3R dinilai tidak transparan dalam pengelolaan keuangan.

Dampaknya, menyebabkan tunggakan sampah ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pemkab Sidoarjo menumpuk hingga mencapai ratusan juta rupiah. Para pendemo menganggap ketidaktransparanan pengelolaan dana memicu tunggakan pembayaran ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jabon hingga mencapai ratusan juta rupiah itu.

Aksi demo ini, akhirnya dimediasi Pemerintahan Desa (Pemdes) setempat atas kebijakan sistem peraturan yang diterapkan pengelola TPST Margorukun Desa Kemiri.

Kasus tunggakan pembayaran sampah ini muncul setelah penggerobak sampah hendak membuang muatan sampahnya ke TPS3R. Namun mereka harus mengantri berjam-jam. Bahkan hingga keesokan harinya atau hari berikutnya untuk bisa melakukan pembongkaran.

"Pernah saya sudah datang ke TPS pukul 09.00 WIB, tapi sampai sore hari baru bisa dibongkar. Sementara ada salah satu penggerobak yang datang sore hari bisa langsung melakukan pembongkaran asalkan bayar," ujar salah seorang penggerobak sampah di tengah aksi demo bersama itu.



Menurutnya, untuk bongkaran sampah dikenai tarif Rp 30.000 hingga Rp 35.000 per rit. Kondisi ini, semakin memberatkan para penggerobak sampah, terutama saat dana yang dikumpulkan tidak dikelola secara transparan.

"Buat apa kita membayar iuran mahal, akan tetapi pengelolaannya dilakukan dengan tidak transparan," ungkap penggerobak sampah lainnya.

Puluhan petugas sampah ini juga meminta agar dikembalikan lagi pengurus lama. Sedangkan pihak Pemdes Kemiri tidak setuju karena mereka tidak memiliki dasar alasan yang tepat. Padahal dengan kepengurusan yang baru yang dinakodai Andik Fadli juga dinilai sudah baik.

"Alasannya apa mau ganti kepengurusan lagi. Karena kepengurusan yang baru ini untuk mengisi kepengurusan yang kosong. Jadi tidak perlu adanya pergantian lagi," kata Kepala Desa (Kades) Kemiri, Novi Ari Wibowo kepada para pendemo.



Dalam mediasi itu, juga disinggung terkait adanya surat dari Aliansi Masyarakat Kemiri Anti Korupsi tentang hutang pengelola TPS yang tidak membayar retribusi sebesar Rp 240 juta. Padahal, masyarakat Desa Kemiri sudah secara rutin melakukan pembayaran sebesar 12.000 per Kepala Keluarga (KK) dan tidak pernah menunggak pembayaran iuran itu.

"Laporan yang dilakukan Aliansi Masyarakat Desa Kemiri ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo berisi pengelola memiliki tunggakan kepada DLHK Pemkab sebesar Rp 240 juta. Kami meminta pihak pengelola TPS3R untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait besaran hutang itu," kata Ketua BPD Desa Kemiri, Imam.

Sementara Andik Fadli yang menjabat Kasun sekaligus merangkap Ketua Pengelola dan Bendahara TPST Desa Kemiri saat ditanya masalah hutang kepada ke DLHK, dirinya membeberkan dan mengakui pihak pengelola memang punya hutang sebesar Rp 240 juta. Hutang itu, untuk membangun fasilitas sarana TPST baik atap bangunan maupun tungku untuk pembakaran.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

"Karena anggaran untuk perbaikan itu semua dananya berasal dari desa masih belum ada. Kita perlu melakukan perbaikan fasilitas TPST, tetapi anggaran dari desa masih belum keluar. Jadi kita gunakan dulu uang setoran untuk melakukan perbaikan TPST," jelas Andik Fadli.

Selain itu, Andik juga menyampaikan sebelumnya permasalahan itu sudah dibicarakan secara internal dan disaksikan anggota dewan untuk memakai uang itu terlebih dahulu agar pembangunan itu bisa terlaksana. Setelah anggarannya turun, baru nanti akan dibayarkan atau diganti uang sebesar 240 juta itu.

"Nanti kalau anggaran dari desa turun akan dibuat membayar tunggakan itu. Hal ini sudah disepakati secara internal dan kesepakatan sampai akhir 2026 hutang itu harus sudah beres. Kami juga sudah membayar cicilan sebesar Rp 30 juta jadi kurang Rp 210 juta mas," kata Andik Fadli.

Sementara disisi yang lain, TPS3R Desa Kemiri Tahun Anggaran 2024 juga mendapatkan bantuan anggaran Dana Desa sebesar Rp 75 juta untuk pembangunan fasilitas berupa atap. Sedangkan di Tahun Anggaran 2025 mendapat anggaran Dana Desa sebesar Rp 60 juta untuk pembangunan tungku pembakaran.

Menurut Ketua BPD Kemiri Imam, seharusnya pengelolaan anggaran yang dikumpulkan dari retribusi masyarakat untuk sampah tidak dicampuradukkan dengan anggaran Dana Desa sebagai penunjang fasilitas TPS3R. Namun hingga saat ini, TPS3R Desa Kemiri masih memiliki tunggakan hingga ratusan juta rupiah ke TPA Jabon itu.

"Sebenarnya sejak Tahun 2023 lalu, kami sudah meminta laporan pertanggungjawaban Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Tapi sampai saat ini, tidak ada laporan apapun yang diberikan kepada kami hingga munculnya tunggakan sebesar Rp 240 juta di TPA Jabon itu," pungkasnya. Ary/Waw

